

## **BAB II**

### **DINAMIKA NEGARA ERITREA DAN DJIBOUTI**

Dalam bab II ini penulis membahas tentang dinamika kedua negara baik Eritrea maupun Djibouti. Dinamika yang di bahas mencakup beberapa bidang antara lain dibidang letak geografis, sosial-politik dan ekonomi serta dinamika hubungan antara kedua negara, terutama semasa konflik perbatasan pertama dan kedua.

#### **A. Dinamika Negara Eritrea**

##### **1. Dinamika Geografis**

Eritrea atau dalam bahasa Tigriña *Hegere Ertra* merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Timur tepatnya di kawasan tanduk Afrika atau semenanjung Somali. Negara ini memiliki bentang garis pantai sepanjang 2.234 km (1.388 mil) dan menghadap langsung ke laut Merah di timur laut. Serta memiliki panjang garis perbatasan darat sepanjang total 1.626 km (1.010 mil). Dimana berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Djibouti di sebelah tenggara, Ethiopia di selatan, dan Sudan di barat (Encyclopedia). Sedangkan memiliki luas total wilayah seluas 117,600 km<sup>2</sup>.

Lokasi Eritrea yang terletak di pesisir laut Merah membuatnya telah lama menjadi penting dalam sejarah dan budayanya. Fakta yang tercermin dalam nama Eritrea itu sendiri merupakan istilah dari bahasa Italia yaitu *Mare Erythraeum*, bahasa Latin untuk "Laut Merah." Laut Merah adalah jalur perdagangan laut internasional yang sangat berperan penting dalam perkembangan peradaban dunia. Dibuktikan adanya kekuatan asing seperti Turki, Mesir, dan Italia yang berusaha untuk mendominasi dengan merebut kendali pelabuhan di pantai Eritrea. Pada zaman kolonial Italia, Eritrea menjanjikan akses komoditi dagang seperti, emas, dan kopi.

## Gambar 2.1.

### Peta negara Eritrea



Sumber : One World Nations

<http://www.nationsonline.org/oneworld/map/eritrea-political-map.htm>

diakses pada tanggal Februari 2018

Kondisi geografis Eritrea didominasi oleh dataran tinggi Etiopia dan gurun. Sekitar 4% lahannya bisa ditanami tanaman. Sumber daya alam meliputi emas, kalium, seng, tembaga, garam, dan ikan. Karena terletak di kawasan sub-sahara membuat iklim dan suhu di Eritrea sangatlah kering dimana suhu udara dapat mencapai 60°C (140°F) terutama pada gurun Danakil di provinsi paling selatan Eritrea, Denkalia. (Gale, Eritrea, 2007).

## 2. Demografi penduduk Eritrea

Populasi penduduk Eritrea diperkirakan mencapai 4,954,645 jiwa pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sekitar 0.85. penduduk Eritrea yang menempati wilayah perkotaan hanya sebesar 23,6% dari total populasi dan mayoritas tinggal di kota Asmara ibukota dari Eritrea dengan jumlah penduduk sekitar 804,000 jiwa pada tahun 2017.

Tingkat melek huruf keseluruhan diperkirakan hampir 74% di tahun 2015.

**Gambar 2.2.**  
**Bendera Eritrea**



Sumber : Fact Encyclopedia

<http://eritreaflag.facts.co/eritreaflagof/eritreaflag.php>

diakses pada tanggal 11 Februari 2018

Penduduk Eritrea terdiri dari beberapa kelompok etnis, masing-masing memiliki bahasa dan tradisi budayanya sendiri. Selain bahasa yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis, bahasa Arab dan bahasa Inggris dipahami secara luas serta bahasa Italia kadang-kadang digunakan juga dalam beberapa sektor dan istilah. Setidaknya ada sembilan suku bangsa yang di akui oleh pemerintah Eritrea antara lain adalah Tigrinya yang merupakan suku bangsa mayoritas dengan 55% dari total populasi dan tersebar diseluruh pelosok negara, selanjutnya ada suku bangsa Tigre 30%, Saho 4%, Kunama 2%, Rashaida 2%, Bilen 2% dan 5% yang terdiri dari suku bangsa Afar, Beni Amir dan Nera. Selain memiliki suku bangsa yang beragam Eritrea juga memiliki komposisi penduduk berdasarkan agama yang beragam dimana terdiri dari 49% penduduknya memeluk agama nasrani yang terdiri dari Gereja Orotodox, Katolik Roma dan Protestan, 47% memeluk agama islam, 2% atheis dan 2% lainnya merupakan penganut agama kepercayaan tradisional Afrika (Eritrea.be, 2018).

### 3. Politik dan Pemerintahan Eritrea

Dalam bidang politik negara ini merupakan negara paling tertutup di benua Afrika (Kästle). Sistem pemerintahan Eritrea adalah Republik dimana Kepala negara dan Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Negara yang merdeka secara *de facto* dari Ethiopia pada 24 Mei 1991 dan secara *de jure* menjadi negara berdaulat pada April 1993 setelah melakukan referendum dan mendapatkan suara sebesar 99.8% memilih untuk menjadi negara merdeka dan lepas dari pemerintahan Ethiopia (Nur, 2013). Semenjak referendum yang dilakukan pada tahun 1993 dimulailah masa pemerintahan transisi selama empat tahun (1993-1997).

**Gambar 2.3.**  
**Presiden Eritrea Isaias Afewerki**



Sumber : Sudan Tribune News  
<http://dev.sudantribune.com/All/Article/Index/5-11-2013-Rights-group-says-Eritrea-detains-10-000-political-prisoners/46521>

diakses pada tanggal 22 Maret 2018

Pada masa transisi tersebut pemerintah Eritrea di kendalikan oleh rejim partai *People's Front for Democracy and Justice* atau EPLF/PFDJ dimana pada masa awal pemerintahannya setelah merdeka dari Ethiopia, rejim tersebut

berjanji menerapkan sistem yang lebih demokrasi namun dalam praktiknya rejim tersebut gagal memenuhi janji yang menyebabkan adanya represi dalam negeri. Dalam praktik politiknya Eritrea adalah sebuah negara dengan sistem satu partai yang dimiliterisasi dan kontrol oleh partai *People's Front for Democracy and Justice* atau Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (PFDJ) dan dipimpin oleh Isaias Afewerki serta menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Eritrea. Afewerki telah menjabat sejak kemerdekaan Eritrea pada tahun 1993 sampai sekarang.

Pembentukan, struktur partai dan prinsip-prinsip revolusioner dari EPLF adalah reaksi terhadap insiden sejarah dan realitas politik pada saat itu. Dimana partai EPLF lahir dalam suasana gejolak politik revolusioner dan merupakan penerus dari *Eritrean Liberation Front* atau Front Pembebasan Eritrea (ELF) yang memberontak menuntut kemerdekaan dari Ethiopia, sejak akhir 1960-an.

EPLF sangat di pengaruhi oleh ideologi Marxis-Leninis-Maois. Dimana dalam politik pemerintahan awal partai ini sangat tidak percaya dengan persepsi Barat yang sangat eksploitatif. Selain itu dalam proses pembuatan keputusan Eritrea sangat terpusat dan sangat terpengaruhi dari pemikiran-pemikiran atau pengalam dari partai EPLF yang dipimpin oleh Isaias Afewerki.

Kelompok politik lain dibatasi untuk berorganisasi. Pemilu nasional telah dijadwalkan dan dibatalkan secara berkala. Sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Eritrea merupakan salah satu negara di benua Afrika yang menjalankan pemerintahan otoriter.

Karena sistem pemerintah Eritrea sangat otoriter dimana kebebasan dalam berpendapat dan pers sangat dibatasi bahkan dilarang serta perekonomian yang tidak stabil menyebabkan banyak penduduknya bermigrasi atau mengungsi keluar dari negeri tersebut. Eritrea telah menjadi negara sumber pengungsi

sejak setidaknya tahun 1960an, ketika perang 30 tahun kemerdekaannya dari Ethiopia dimulai.

Sejak mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1993, penduduk Eritrea terus bermigrasi ke Sudan, Ethiopia, Yaman, Mesir, bahkan Israel karena kurangnya hak asasi manusia atau kebebasan politik, pendidikan dan kesempatan kerja, atau untuk mencari suaka karena militerisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun disisi lain diaspora besar Eritrea telah menjadi sumber pengiriman uang yang vital, mendanai perangnya untuk kemerdekaan dan menyediakan 30% dari PDB negara tersebut setiap tahunnya sejak menjadi negara independen (Factbook, 2018).

#### 4. Dinamika Ekonomi Eritrea

Negara yang memiliki GDP *gross Domestic Products* atau pendapatan Produk Domestik Bruto perkapita sekitar \$1,400 pada tahun 2017 dengan tingkat inflasi sebesar 9% pada tahun yang sama. Sedangkan dalam tingkat pengangguran sebesar 8.6% pada tahun 2013 dimana mengalami penurunan setelah tahun 2012 dengan tingkat pengangguran sebesar 10%.

Sebagian besar penduduk Eritrea menetap diwilayah pedesaan dimana perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian dan perternakan. Karena mayoritas penduduk Eritrea bermukim di area pedesaan maka sektor pertanian menjadi sektor utama negara ini. Perekonomian Eritrea tergantung pada sektor pertanian dan pemeliharaan hewan ternak. Pertanian sejauh ini merupakan sektor ekonomi nasional yang paling penting, memberikan penghidupan sekitar empat per lima dari populasi dan mencatat sebagian besar ekspor Eritrea.

Seperti ekonomi dibanyak negara Afrika, sebagian besar penduduk hampir atau sekitar 80% penduduk Eritrea, terlibat dalam pertanian subsisten atau model pertanian swasembada (*self-sufficiency*) dimana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka dan keluarganya sendiri (Waters, 2007), namun

sektor ini hanya menghasilkan sebagian kecil dari total output negara tersebut.

Dengan seiring bertambahnya waktu model pertanian subsisten gagal memenuhi kebutuhan penduduk Eritrea yang terus bertambah karena kekeringan yang berulang, berkurangnya lahan subur, penggembalaan berlebihan, erosi tanah, dan kekurangan petani akibat wajib militer dan urbanisasi. Penekanan pemerintah pada pengeluaran untuk pertahanan atas pertanian dan kurangnya devisa untuk mengimpor makanan juga berkontribusi terhadap kerawanan pangan.

Hal tersebut diperparah setelah meraih kemerdekaannya dari Ethiopia pada tahun 1993, Eritrea menghadapi banyak masalah ekonomi, termasuk kurangnya sumber keuangan dan kekeringan yang berkepanjangan serta diperburuk oleh kebijakan ekonomi yang ketat. Eritrea memiliki komando ekonomi di bawah kendali satu-satunya partai politik, Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan.

Luas Eritrea yang terbentang sepanjang Laut Merah dan garis pantainya memiliki potensi besar dan peluang untuk eksploitasi sebagai industri pariwisata, perikanan, dan jasa pengiriman. Negara ini tidak terus menerus berdiam dalam kesedihan, Eritrea mencoba bangkit dengan menjual apa yang ada di negara tersebut. Salah satunya adalah menjual potensi alam dan sejarah yang ada di Eritrea. Industri pariwisata di Eritrea mulai dikembangkan sejak tahun 1999 dengan merencanakan pengembangan pariwisata nasional yang komprehensif tahun 2000-2020 yang masuk dalam kerangka kerja Kementerian Pariwisata dan Budaya Eritrea. Dengan menargetkan jumlah kunjungan turis asing ke Eritrea mencapai 1 juta kunjungan pada tahun 2020.

Selain pariwisata, Eritrea juga menyediakan jasa terutama pada aktifitas bongkar muat di pelabuhan. Eritrea terus membenahi pelabuhan-pelabuhan yang ada terutama di kota Assab dan Massawa. Pemerintah Eritrea juga membuat zona

bebas yang baru didirikan di pelabuhan-pelabuhan Eritrea. Hal tersebut ditujukan untuk menarik investor, menanamkan investasinya di Eritrea terutama di kedua kota tersebut. Semua ini dimaksudkan untuk mendorong investasi dan mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya alam negara, menciptakan dan memperluas peluang kerja, mendorong pengenalan teknologi baru, pertumbuhan regional yang adil dan partisipasi perusahaan skala kecil dan menengah.

Tidak seperti zona bebas negara-negara berpenghasilan menengah lainnya, investor di Eritrea akan menikmati menjual produk mereka di pasar dunia tanpa kendala karena Eritrea tidak tunduk pada pembatasan masuk pasar produk zona bebasnya oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan semua biaya jauh lebih murah daripada pesaing zona bebas lainnya di kawasan ini di semua tingkatan. (Shabait, 2014)

## 5. Dinamika Militer Eritrea

Dengan populasi hanya sekitar 5,918,919 pada juli 2017 namun Eritrea memiliki jumlah personil angkatan bersenjata yang banyak di Afrika sekitar 202.000 personil angkatan bersenjata aktif yang dimiliki oleh negara ini. Serta merupakan tentara terbesar kedua di Afrika Timur dan menempati urutan ke-28 negara yang memiliki jumlah personil angkatan bersenjata aktif. Angkatan Darat Eritrea memiliki staf yang baik, terlatih, dan dibandingkan dengan mayoritas tentara di negara Afrika lainnya, yang didanai dengan baik. Memang, selama perebutan kemerdekaan Eritrea dari Ethiopia, militer Eritrea pernah dikagumi sebagai salah satu organisasi pertarungan paling efektif di dunia (NationMaster, 2018).

Selain memiliki jumlah personel angkatan bersenjata yang banyak, Eritrea juga memiliki jumlah penduduk yang dapat dijadikan *manpower* ketika negara dalam keadaan darurat. *Manpower* di Eritrea merupakan penduduk yang masuk kedalam penduduk yang usianya cukup untuk melakukan wajib militer. Pada tahun 2008 *manpower* yang dimiliki Eritrea sekitar 2.2 juta jiwa. Anggaran untuk militer Eritrea sebesar

US\$ 220.1 juta atau sekitar 6.3% dari GDP pada tahun 2009 (NationMaster, 2018).

## **B. Dinamika Negara Djibouti**

### **1. Dinamika Geografis**

Djibouti merupakan sebuah Republik yang dahulu dikenal sebagai Somaliland Prancis terletak di pantai timur Afrika di sepanjang selat Bab al-Mandab, selat yang menghubungkan antara Laut Merah dengan Teluk Aden. Djibouti berbatasan langsung dengan Eritrea (125 km) di utara, Ethiopia (342 km) di utara dan barat serta Somalia (61 km) di selatan dengan total panjang perbatasan sepanjang 530 km. Total luas wilayah Djibouti sekitar 22.000 km<sup>2</sup> (8.494 sq mi) dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 314 km (195 mil). Ibu kota Djibouti, Djibouti, terletak di bagian timur negara ini (Gale, Djibouti, 2007).

**Gambar 2.4.**  
**Peta negara Djibouti**



Sumber : Nations Online

<http://www.nationsonline.org/maps/djibouti-map.jpg>

diakses pada tanggal Februari 2018

Djibouti terletak di gurun Danakil yang memiliki kondisi alam dan iklim yang sangat ekstrem. Beriklim kering dan panas, serta curah hujan jarang dan tidak menentu. Selama musim panas, dari bulan Mei sampai September, suhu siang hari di ibukota rata-rata 31°C (87°F) dan angin monsun di timur laut. Selama musim hangat, dari bulan Oktober sampai April, suhu siang hari rata-rata mencapai 37°C (99°F). Kelembaban tinggi sepanjang tahun, namun rata-rata curah hujan tahunan kurang dari 13 cm (5 inci) (CIA, 2018).

Secara geografis negara ini terbagi menjadi tiga wilayah utama: dataran pantai, kurang dari 200 m (656 kaki) di atas permukaan laut; pegunungan, dengan rata-rata ketinggian sekitar 1.000 m (3.300 kaki) di atas permukaan laut; dan dataran tinggi di bagian barat dengan 300-1.500 m (984-4,921 kaki). Titik tertinggi adalah gunung Moussa Ali dengan ketinggian sekitar 2.028 m (6.654 kaki) di perbatasan utara dengan Eritrea. Serta danau Assal, merupakan titik terendah di Afrika dan terendah kedua di dunia dengan ketinggian sekitar 155 m (509 kaki) di bawah permukaan laut.

## 2. Dinamika Sosial dan Politik Djibouti

Negara yang terletak di jalur perdagangan ini memiliki komposisi penduduk yang heterogen, namun ada dua etnis grup yang mendominasi di Djibouti yaitu Issa 60% dan Afar 35% serta 5% lainnya merupakan etnis Arab, Ethiopia, Perancis dan Italia dengan Total populasi sekitar lebih dari 942,333 pada tahun 2016, ibukota dan kota terbesar adalah Kota Djibouti. Pertumbuhan populasi Djibouti saat ini tumbuh sekitar 1,5% per tahun.

Mayoritas penduduk Djibouti memeluk agama islam atau sekitar 94% dari total penduduknya, dan sisanya sekitar 6% merupakan pemeluk agama Kristen. Etnis Issa mendiami wilayah bagian selatan dekat dengan perbatasan Somalia. Etnis Issa juga merupakan rumpun dari etnis Somali yang berada di Somalia. Sedangkan etnis Afar bermukim di daerah utara di perbatasan Eritrea. Etnis Afar juga merupakan suku yang

terbagi dan tersebar di tiga negara selain di utara Djibouti terdapat juga di wilayah selatan Eritrea dan timur Ethiopia. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Prancis dan Arab (keduanya resmi), selain itu ada bahasa minoritas yang digunakan oleh suku-suku lainnya seperti bahasa Somalia, dan bahasa Afar.

**Gambar 2.5.**  
**Bendera Djibouti**



Sumber : Encyclopædia Britannica  
<https://www.britannica.com/topic/flag-of-Djibouti>  
diakses pada tanggal 11 Februari 2018

Bentuk negara ini adalah Republik Demokratik dimana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, dan dipilih secara langsung untuk masa jabatan enam tahun . Sedangkan kepala pemerintah dipimpin oleh perdana menteri. Sistem partai di Djibouti adalah multi partai namun dalam prakteknya kekuasaan partai didominasi oleh partai *the socialist People's Rally for Progress*.

Sejak berdirinya Djibouti sebagai negara berdaulat, negara ini baru memiliki dua presiden yang telah menjabat. Presiden pertama Djibouti adalah Hassan Gouled Aptidon yang menjabat selama tiga periode sejak tahun 1981 hingga 1993. Saat ini presiden Djibouti adalah Ismaïl Omar Guelleh, yang telah menjabat selama empat periode sejak tahun 1999. Pada pemilu terakhir tahun 2016 presiden Guelleh yang diusung oleh partai *People's Rally for Progress* memenangi pemilu secara mutlak dengan suara mencapai 86.68%.

Secara administratif, negara ini terbagi menjadi lima wilayah dan satu kota, dengan sebelas subdivisi serta kabupaten tambahan. Dan kota terbesar adalah kota Djibouti yang sekaligus sebagai ibukota negara dan pusat ekonomi dan pemerintahan. Djibouti juga mengikuti berbagai organisasi internasional, termasuk diantaranya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab.

Karena letak geografisnya di Teluk Aden, negara tandus ini memiliki kepentingan geopolitik yang cukup besar, terutama dalam mengendalikan akses dari dan menuju Laut Merah dan Terusan Suez, salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia. Djibouti merupakan bekas kolonial Prancis, dan mendapatkan kemerdekaannya pada 27 Juni 1977.

### 3. Dinamika Ekonomi

Djibouti memiliki pendapatan perkapita senilai US\$ 3,582 pada tahun 2017 atau senilai total pendapatan nasional sekitar US\$3,656 miliar. Dimana perekonomian Djibouti didasarkan pada sektor jasa terutama sektor layanan yang berhubungan dengan lokasi strategis negara tersebut sebagai pelabuhan laut di Laut Merah dan status strategis negara tersebut sebagai zona perdagangan bebas di Tanduk Afrika. Selain itu sektor pariwisata dan perhotelan juga memegang kendali dalam perekonomian Djibouti.

Berbeda dengan negara tetangganya Eritrea, lahan di Djibouti relatif sempit dan gersang serta iklim dan cuaca yang ekstrem dimana curah hujan kurang dari 4% membatasi produksi pertanian, dan sebagian besar makanan harus diimpor. Kegiatan impor, ekspor, dan ekspor ulang, terutama kopi dari negara tetangga yang terkurung daratan Ethiopia mewakili 70% aktivitas pelabuhan di terminal kontainer Djibouti. Djibouti memiliki sedikit sumber daya alam dan sedikit industri. Oleh karena itu, bangsa ini sangat bergantung pada bantuan luar negeri untuk membantu mendukung neraca pembayaran dan membiayai proyek-proyek pembangunan.

Tiga perempat penduduk Djibouti tinggal di ibu kota sedangkan sisanya kebanyakan penggembala nomaden sedangkan tingkat pengangguran hampir 60% terus menjadi masalah utama. Sementara inflasi tidak menjadi perhatian, karena stabilnya nilai franc Djibouti dengan dolar AS, nilai franc Djibouti yang sangat artifisial mempengaruhi keseimbangan pembayaran Djibouti.

Permasalahan ekonomi Djibouti perlahan dapat diatasi oleh pemerintah Djibouti dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan. Salah satunya pada tahun 2012 Djibouti memulai membangun pelabuhan ketiga untuk mengamankan posisinya sebagai pusat *transshipment* penting di Tanduk Afrika dan jalur utama bagi kegiatan perdagangan Ethiopia. Djibouti juga menerima dana pada akhir 2012 untuk pabrik desalinasi untuk memulai mengatasi kekurangan air tawar yang parah yang mempengaruhi Kota Djibouti.

Selain itu pemerintah juga telah menekankan pembangunan infrastruktur untuk transportasi dan energi di Djibouti serta dengan adanya bantuan dari mitra asing, khususnya Tiongkok telah mulai meningkatkan dan memodernisasi kapasitas pelabuhannya. Pada tahun 2017, Djibouti membuka dua proyek terbesar dalam sejarahnya, *Doraleh Port* dan *Djibouti - Addis Ababa Railway*, yang akan meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk memanfaatkan lokasinya yang strategis.

#### 4. Dinamika Militer Djibouti

Letak dari Djibouti sangatlah penting dalam jalur perdagangan internasional maupun keamanan kawasan yang berada di tanduk Afrika dimana negara-negara sekitar Djibouti dalam segi keamanan-politik tidak stabil. Seperti lemahnya peran pemerintah dalam mengatur negara yang terjadi di Somalia serta adanya sindikat perampok bersenjata di lepas laut Somalia dan militan al-Shabab menimbulkan ancaman serius terhadap wilayah tersebut.

Selain itu di seberang barat Djibouti kurang dari 20 mil timur laut melintasi Selat Bab-el-Mandeb terdapat Yaman, yang saat ini dalam konflik, merupakan jalan yang mudah ke Timur Tengah tanpa harus berbasis di sana (Oladipo, 2015). Lalu di utara terdapat Eritrea yang negaranya masih dalam kontrol penuh pemerintah yang otoriter, selanjutnya di barat terdapat Ethiopia yang keadaan dalam negerinya masih diganggu oleh keberadaan kelompok separatis.

Membuat Djibouti menjadi titik atau sebagai basis yang strategis untuk mendirikan pangkalan militer internasional, guna menjaga keamanan Djibouti sendiri dan kawasan. Adapun basis militer negara-negara besar yang dibangun di Djibouti beberapa diantaranya adalah Amerika Serikat, Perancis, Jepang dan Tiongkok. Pada tahun 2002, Amerika Serikat mendirikan pangkalan militernya di Djibouti dan merupakan pangkalan militer terbesar Amerika (Camp Lemonnier) di Afrika yang terletak di timur kota Djibouti.

Selain itu, Djibouti merupakan satu-satunya negara di benua Afrika yang memiliki pangkalan militer China. Selain China, lokasinya yang strategis juga dijadikan pilihan markas pangkalan militer oleh negara lainnya seperti Amerika Serikat, Perancis dan Jepang. Kondisi keamanan laut menjadi penting bagi negara-negara tersebut untuk mengamankan aktivitas perdagangan mereka di laut Merah mengingat 'bahaya laten' yang mengintai di sisi barat dan timur Djibouti yang diapit oleh dua negara 'gagal' (*failed state*) dengan sejarah kalam bajak lautnya yaitu Eritrea dan Somalia (Kresna, 2017).

Negara yang memiliki anggaran militer sebesar kurang lebih sekitar 3.7% dari GDP negara dan memiliki pasukan angkatan bersenjata memiliki sekitar kurang lebih 8.400 personil. Dengan rincian sebagai berikut angkatan darat memiliki 8.000 personil; angkatan udara, 200 personil dan angkatan laut 120 personil.

Angkatan Darat Djibouti digunakan untuk keamanan internal, dan dibagi menjadi tiga komando regional: pemerintah

utara, tengah, dan selatan. Kontrol perbatasan tetap menjadi satu dari satu masalah paling penting di Djibouti karena Djibouti menerima ratusan imigran ilegal dan penungsi setiap minggunya.

Untuk mempermudah pembaca dalam membandingkan dinamika antara negara Eritrea dengan Djibouti, maka penulis mencoba menjabarkannya dengan menggunakan tabel 2.1

### **C. Hubungan Eritrea dengan Djibouti**

Hubungan antara Eritrea dengan Djibouti cenderung fluktuatif. Semenjak Eritrea mendeklarasikan diri menjadi negara yang berdaulat, negara ini telah terlibat banyak konflik dengan beberapa negara tetangganya, salah satunya dengan Djibouti. Konflik yang dialami oleh Eritrea didominasi oleh konflik perbatasan, dimana Eritrea pernah terlibat konflik perbatasan dengan seluruh negara yang berbatasan langsung dengan Eritrea antara lain dengan Sudan, Ethiopia, Yaman di kepulauan Hanish dan yang masih berlanjut sampai sekarang konflik perbatasan dengan Djibouti di Ras Doumeira.

#### **1. Konflik Pertama tahun 1998-2000**

Ketegangan antara Eritrea dan Djibouti sebagian dapat dijelaskan dengan hubungan dekat Djibouti dengan Ethiopia. Eritrea berjuang untuk melepaskan diri dari Ethiopia selama beberapa dekade antara tahun 1960an dan awal 1990an. Pada tahun 1993 ketika Eritrea lepas dari Ethiopia, dan mendapatkan kemerdekaannya setelah perang yang berkepanjangan dengan Ethiopia, kembali menegaskan kembali tuntutan mereka terhadap Ras Doumeira. Situasi hampir menjadi kekerasan pada tahun 1996, ketika Djibouti menuduh Eritrea menembaki dan kemudian mengirim pasukan ke teritorium yang dianggapnya sebagai milik mereka sendiri. (Report, 2008)

Sejak saat itu, Eritrea mengalami hubungan yang buruk dengan Ethiopia dan Djibouti yang terjadi antara tahun 1998

hingga 2000. Hubungan tetap tegang dan tidak terselesaikan sejak akhir pertempuran. Sedangkan Djibouti mendapat keuntungan ekonomis dari konflik Ethiopia-Eritrea pada tahun 1998-2000 karena Djibouti menjadi menjadi satu-satunya akses perdagangan bagi Ethiopia (Pike, 2015).

Sebelumnya pada tahun 1994 Eritrea melakukan mediasi perundingan damai untuk mengakhiri perang sipil 3 tahun di Djibouti. Kedua negara membentuk badan operasi perbatasan bersama, dan hubungan antara keduanya membaik dari tahun 1994 sampai 1998. Namun, setelah konflik Eritrea-Ethiopia dimulai pada tahun 1998, Ethiopia mulai menggunakan pelabuhan di Djibouti karena mereka tidak lagi memiliki akses ke pelabuhan, akibatnya Eritrea menuduh Djibouti mendukung Ethiopia dalam keterlibatannya di konflik antara Eritrea dengan Ethiopia.

Karena tuduhan yang diberikan oleh Eritrea pada bulan November 1998, Djibouti memutuskan hubungan diplomatik dengan Eritrea. hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut putus sampai tahun 2001. Mengakibatkan ketegangan perbatasan dan menghentikan layanan udara oleh maskapai penerbangan Djibouti. Namun, hubungan meningkat secara signifikan sejak kesepakatan damai Eritrea dan Ethiopia tercapai.

## 2. Konflik kedua tahun 2008

Pada tahun 2008, perselisihan perbatasan di Ras Doumeira antara Eritrea dengan Djibouti kembali terjadi, ketegangan meningkat ketika Eritrea mengumpulkan tentara di sepanjang wilayah perbatasan Ras Doumeira. Pertarungan antara tentara Eritrea dan Djibouti mengakibatkan kematian lebih dari 30 orang.

Sejak April 2008 terjadi ketegangan di perbatasan Djibouti dengan Eritrea setelah serangan oleh Eritrea di wilayah tersebut. Pada bulan April 2008, otoritas Djibouti memprotes penyebaran pasukan Eritrea dan pembangunan benteng militer di sepanjang

perbatasan bersama mereka, terutama di semenanjung Ras Doumera, di dekat selat strategis Bab al Mandeb antara Teluk Aden dan Laut Merah. Pada tanggal 10 Juni, pertukaran pertama senjata api kecil terjadi di antara kedua negara, saat pasukan Eritrea menembaki pasukan Eritrea yang melarikan diri ke Djibouti. Ada sekitar 70 sampai 80 korban yang dilaporkan, termasuk sekitar 10 korban jiwa.

Hubungan antara Eritrea dan Djibouti kembali memburuk pada tahun 2008 ketika Eritrea mengerahkan pasukannya di daerah yang diperdebatkan di Ras Doumeira. Penempatan pasukan perbatasan Eritrea di wilayah sengketa telah menyebabkan tiga hari bentrokan bersenjata pada tanggal 10 sampai 13 Juni 2008 dan kematian lima puluh tentara Djibouti dan seratus tentara Eritrea.